

BAB I

PENDAHULUAN

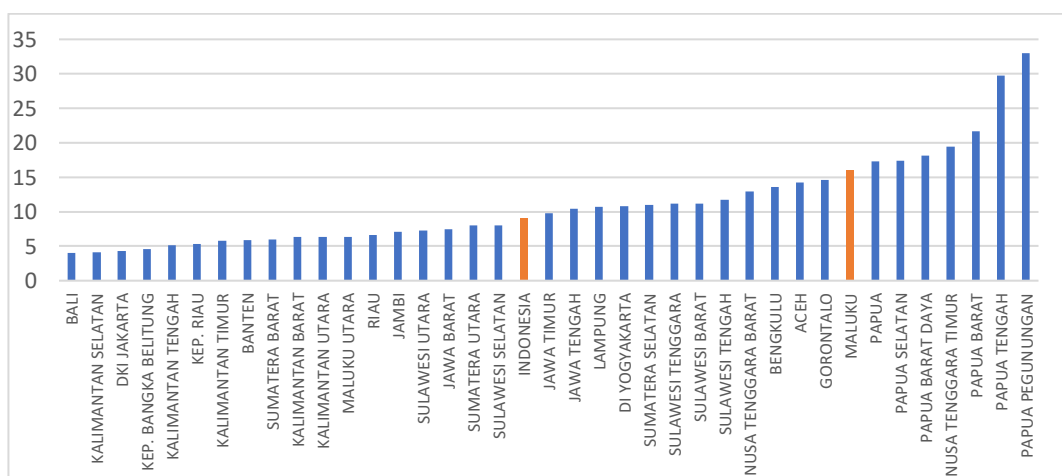
1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman dan sejahtera. Pembangunan nasional menjadi strategi negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia, tujuan pembangunan nasional tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum mencerminkan kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan sehat, adil, dan makmur. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin rendah angka kemiskinan, demikian pula sebaliknya (Solikatun et al., 2018).

Menurut Panjaitan & Hutapea (2024) kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan berelasi dengan lingkungannya secara baik. Namun, secara umum permasalahan yang dihadapi banyak negara terkait kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang disebabkan oleh kemiskinan (Adelia Suryani, 2023). Menurut Sihite et al., (2024) Kemiskinan ialah problematika global yang kompleks dan telah dijadikan fokus perhatian pemerintah. Dalam konteks perekonomian, kemiskinan dapat menghambat proses pertumbuhan dan kemiskinan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Menurut Muliana Padang et al.,

(2025) Kemiskinan adalah permasalahan yang rumit dan dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling berkaitan, seperti penghasilan penduduk, pekerjaan yang belum tercukupi, kesehatan yang kurang baik, pendidikan yang tidak memadai, akses terhadap kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, lokasi geografis, perbedaan antar jenis kelamin, serta lingkungan sekitar.

Tingkat kemiskinan di Indonesia tidak merata antarprovinsi, dipengaruhi oleh perbedaan geografis, struktur ekonomi, pembangunan, dan akses layanan dasar. Oleh karena itu, analisis kemiskinan perlu dilakukan pada tingkat provinsi agar lebih komprehensif dan kontekstual. Berikut ini merupakan tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2024..



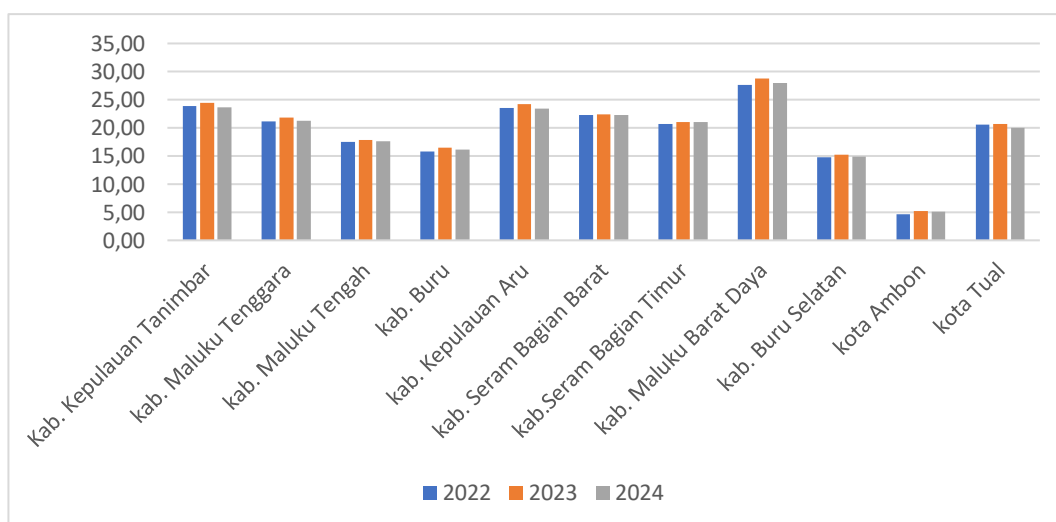
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (%)

Berdasarkan gambar 1.1, wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata rata tingkat kemiskininina di indonesia, menunjukkan bahwa masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan

kemiskinan di Indonesia memiliki dimensi kewilayahan yang kuat, terutama di kawasan timur Indonesia.

Provinsi Maluku sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses pasar, infrastruktur, serta layanan dasar menyebabkan penurunan kemiskinan belum merata dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di setiap kabupaten/kota. Berikut ini merupakan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2022–2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (%)

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat adanya dinamika tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, kelompok dengan nilai di atas rata-rata meliputi Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku

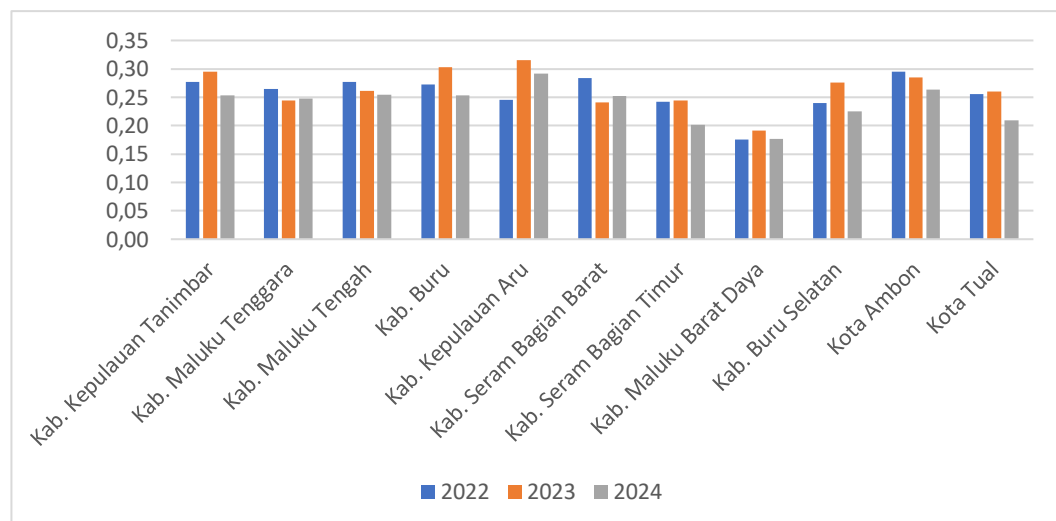
Barat Daya, dan Kota Tual dengan rata-rata sebesar 22,82%, sedangkan kelompok dengan nilai di bawah rata-rata mencakup Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, dan Kota Ambon dengan rata-rata 13,18%. Pada tahun 2023 dan 2024, komposisi wilayah tidak mengalami perubahan, dengan rata-rata kategori tinggi masing-masing 23,34% dan 22,80%, serta kategori rendah 13,73% dan 13,45%. Menurut Barabasi & Hastarini Dwi Atmanti, (2025) provinsi Maluku, ada sebelas kabupaten/kota yang merupakan kepulauan, Mereka terkenal dengan adat budaya mereka, pariwisata, dan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kemiskinan masih ada di Maluku hingga saat ini.

Selain itu, dinamika kemiskinan di Provinsi Maluku juga menunjukkan fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak sepenuhnya inklusif. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku cenderung meningkat, peningkatan tersebut belum diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata, baik antarwilayah maupun antar kelompok pendapatan, sehingga masih terdapat ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan.

Menurut Kuncoro (2006) tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Menurut Bourguignon dalam Schwager (2019), konsep *Poverty–Growth–Inequality Triangle* (PGI) menjelaskan bahwa perubahan tingkat kemiskinan dalam suatu perekonomian ditentukan oleh pertumbuhan pendapatan serta perubahan distribusi pendapatan. Todaro & Smith (2012) menyatakan bahwa Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan

memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Menurut Muta'Ali (2015) menjelaskan bahwa semakin mendekati nilai 0, distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin mendekati nilai 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi.

Gini Ratio berperan penting dalam menjelaskan perbedaan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Ketimpangan yang tinggi meningkatkan risiko kemiskinan karena manfaat pertumbuhan tidak merata, sedangkan distribusi pendapatan yang lebih merata membantu menekan kemiskinan. Berikut ini merupakan ketimpangan pendapatan kab/kota di provinsi maluku tahun 2022-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 3 Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (%)

Berdasarkan gambar 1.3, ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode 2022–2024 menunjukkan dinamika antarwilayah. Pada tahun 2022, wilayah dengan nilai di atas rata-rata meliputi Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, dan Kota

Ambon dengan rata-rata sebesar 0,28, sedangkan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 0,23. Tahun 2023, wilayah dengan nilai di atas rata-rata terdiri dari Kepulauan Tanimbar, Buru, Kepulauan Aru, Buru Selatan, dan Kota Ambon dengan rata-rata sebesar 0,29, sedangkan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 0,24. Sementara itu, pada tahun 2024, wilayah dengan nilai di atas rata-rata meliputi Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon dengan rata-rata sebesar 0,26, sedangkan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 0,20. Menurut BPS Maluku (2023) Perubahan ini diduga terkait perbaikan pemerataan pengeluaran, pemulihan pascapandemi, serta pengaruh perbedaan kualitas infrastruktur dan sumber daya antarwilayah. Perbedaan tersebut menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata, dimana wilayah dengan ketimpangan lebih tinggi cenderung memiliki risiko kemiskinan yang lebih besar.

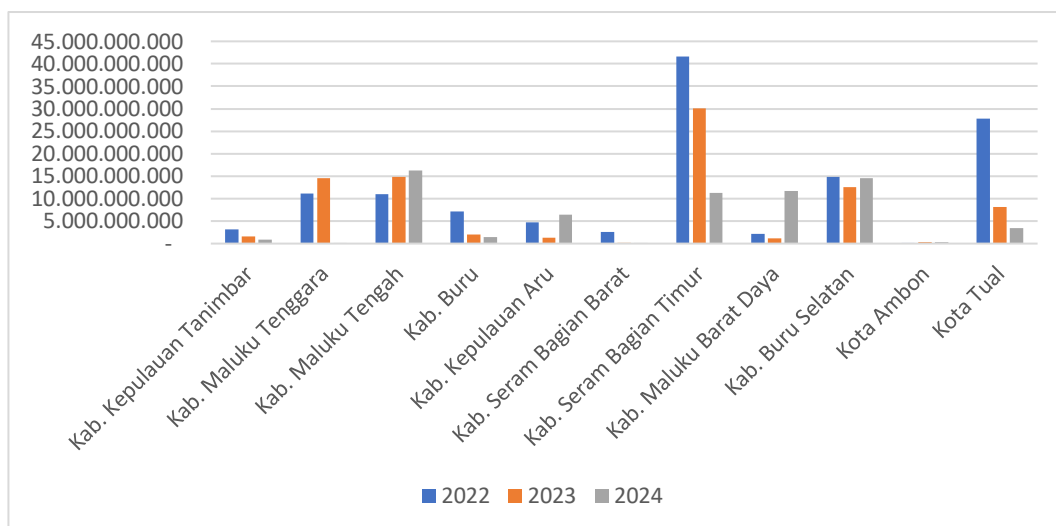
Perbedaan karakteristik wilayah dan struktur ekonomi diduga menyebabkan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menghasilkan temuan yang beragam, sebagaimana tercermin dalam hasil penelitian terdahulu. Penelitian Okta Aking Dwi Padmono, (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara, Novela Wenda et al., (2025) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selain ketimpangan pendapatan, pemerintah juga menjalankan program bantuan sosial sejak tahun 2005 untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan mengurangi kemiskinan. Teori pembangunan sosial oleh Midgley (1995) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan kondisi hidup manusia secara menyeluruh. Kondisi sejahtera terjadi saat kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi.

Dalam konteks ini, bantuan sosial menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan dampak guncangan ekonomi. Efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, efisiensi penyaluran, serta keberlanjutan program agar mampu mendorong pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Menurut Banerjee et al., (2015) belanja bantuan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan asalkan dirancang dengan targeting yang efektif. Belanja bantuan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat miskin, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga (Alfath, 2025).

Dalam konteks Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, efektivitas belanja bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan keterbatasan akses layanan publik, sehingga perannya dalam menurunkan kemiskinan bergantung pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan program di seluruh wilayah provinsi. Analisis distribusi belanja bantuan sosial di tingkat kabupaten/kota

menjadi penting untuk menilai sejauh mana program tersebut menjangkau seluruh wilayah. Berikut gambar yang menunjukkan data Belanja Bantuan Sosial kab/kota di provinsi maluku tahun 2022 sampai 2024



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Gambar 1. 4 Gambar Bantuan Sosial Kab/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4, bantuan sosial kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode 2022–2024 menunjukkan variasi antarwilayah. Pada tahun 2022, wilayah dengan nilai di atas rata-rata meliputi Seram Bagian Timur, Buru Selatan, dan Kota Tual dengan rata-rata sebesar 28,09 miliar rupiah, sedangkan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 5,25 miliar rupiah. Realisasi penyaluran BLT BBM di enam wilayah capai 98,12% (Daniel, 2022). Pada tahun 2023, wilayah dengan nilai di atas rata-rata terdiri dari Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, dan Kota Tual dengan rata-rata sebesar 16,03 miliar rupiah, sedangkan wilayah

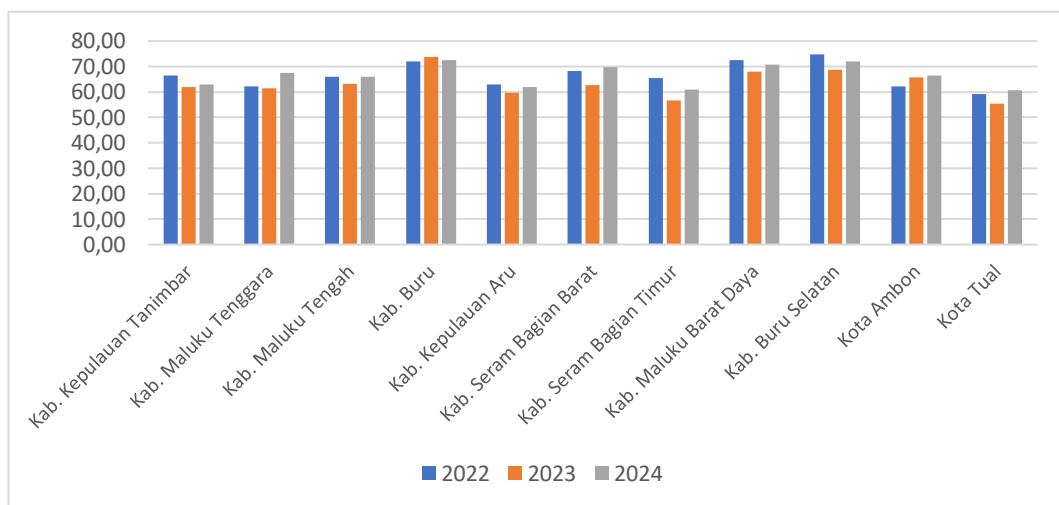
dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 1,09 miliar rupiah. Penyaluran bantuan pangan nasional di Maluku oleh Dinas Sosial didasarkan data penduduk miskin dari BPS (Daniel, 2023). Sementara itu, pada tahun 2024, wilayah dengan nilai di atas rata-rata meliputi Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan dengan rata-rata sebesar 12,05 miliar rupiah, sedangkan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 1,06 miliar rupiah. Melalui kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Propinsi Maluku Tahun 2024 dapat menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program PKH agar tepat sasaran (Cahyani, 2024)

Bantuan sosial bertujuan menurunkan kemiskinan, namun efektivitasnya bervariasi akibat perbedaan penyaluran dan ketepatan sasaran, sehingga hasil empirisnya belum konsisten. Penelitian Aliyah & Bahtiar (2024) Bantuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara penelitian Alfath (2025) Bantuan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Meskipun belanja bantuan sosial berperan penting dalam menjaga kesejahteraan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. *Labor Theory of Value* dari Adam Smith menekankan bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh keterampilan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.. Menurut delviera dalam Septian & Suharianto (2025) TPAK yang tinggi berkorelasi dengan

rendahnya tingkat kemiskinan karena lebih banyak penduduk memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Peningkatan TPAK harus didukung dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin agar mereka mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik dan bisa menurunkan tingkat kemiskinan.

Sebagai wilayah kepulauan, keterlibatan angkatan kerja di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh akses ekonomi, struktur lapangan kerja, dan perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, variasi tingkat partisipasi angkatan kerja antarwilayah penting dianalisis untuk memahami kemampuan masyarakat dalam keluar dari kemiskinan. Berikut gambar tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2022-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 5 Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (%)

Berdasarkan gambar 1.5, tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, wilayah dengan tingkat di atas rata-rata meliputi Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Buru, Kab. Seram

Bagian Barat, Kab. Maluku Barat Daya, dan Kab. Buru Selatan dengan rata-rata sebesar 70,79%, Dan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 62,97%. Pada Februari 2022, sebesar 63,79 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan persentase pekerja informal turun 3,44 persen poin dibanding Februari 2021 (John Soplanit, 2022). Tahun 2023, wilayah dengan nilai di atas rata-rata terdiri dari Kab. Buru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan, dan Kota Ambon dengan rata-rata sebesar 69,06%, Dan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 60,17%. Sementara itu, pada tahun 2024, wilayah dengan nilai di atas rata-rata meliputi Kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Barat Daya, dan Kab. Buru Selatan dengan rata-rata sebesar 70,55%, sedangkan wilayah dengan nilai di bawah rata-rata mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 63,21%. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan struktur ekonomi dan kesempatan kerja antarwilayah. Faktor lain yang memengaruhi TPAK meliputi pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyediakan lapangan pekerjaan, serta peningkatan tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Fitria & Diana Novita, 2024). Keterbatasan lapangan kerja, akses ekonomi, dan faktor geografis turut memengaruhi kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan serta berdampak pada tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.

Dinamika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang berbeda antarwilayah menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap kemiskinan tidak bersifat seragam. Perbedaan kondisi ekonomi, struktur lapangan kerja, dan kualitas kesempatan kerja

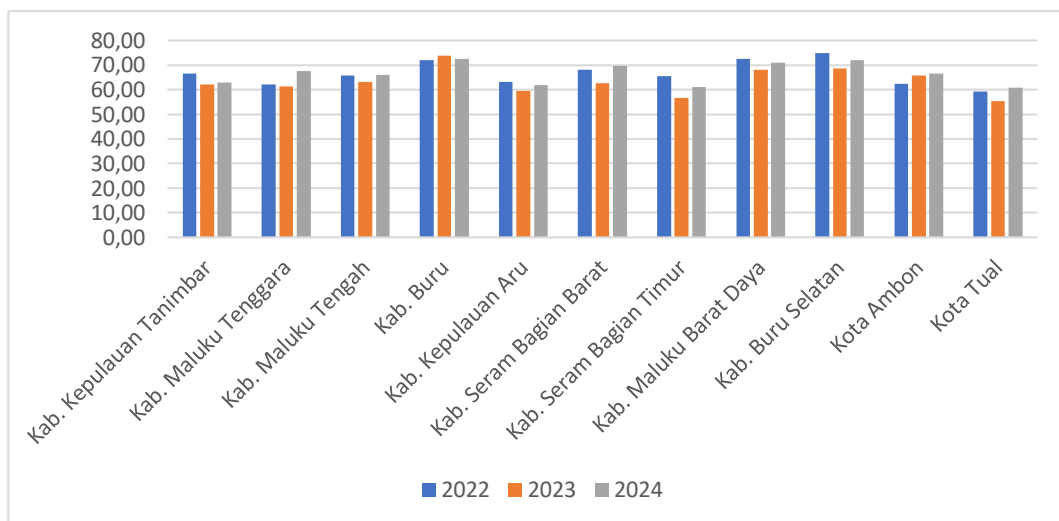
menyebabkan hubungan antara TPAK dan kemiskinan bervariasi antarwilayah, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian empiris. Penelitian Mirah et al., (2020) menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja positif dan signifikan terhadap kemiskinan. sementara, Sihite et al., (2024) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selain faktor ketenagakerjaan, kualitas pembangunan manusia juga memengaruhi kemampuan penduduk dalam berpartisipasi secara ekonomi. Sejalan dengan Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker dalam Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022), menyatakan jika manusia bukan sekedar sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia merupakan faktor penting yang mencakup aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan dalam menunjang produktivitas. Secara makro, konsep ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan mencerminkan capaian pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, dengan Umur Harapan Hidup (UHH). Dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH memainkan peran yang sangat penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan (Muliana Padang et al., 2025). Umur harapan hidup dapat berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, status ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan faktor-faktor sosial lainnya (*World Health Organization*, 2019). Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (2023) peningkatan Umur Harapan Hidup di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini belum diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan

dan layanan kesehatan yang memadai, yang akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan.

Provinsi Maluku menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, terutama terkait peningkatan penduduk usia lanjut, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan akses antarwilayah memengaruhi kualitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan umur harapan hidup dan kemiskinan tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan akses antarwilayah. Berikut ini merupakan Umur Harapan Hidup kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2022–2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 6 Umur Harapan Hidup Kab/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (Tahun)

Berdasarkan gambar 1.6, Umur Harapan Hidup (UHH) kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2022–2024, UHH cenderung meningkat di seluruh wilayah meskipun dengan capaian yang berbeda. Peningkatan ini terkait dengan perbaikan layanan kesehatan yang dilakukan di berbagai wilayah Maluku (BPS Provinsi

Maluku, 2023). Pada tahun 2022, kategori tinggi meliputi Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual dengan rata-rata sebesar 67,13 tahun, sedangkan kategori rendah mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 62,46 tahun. Pada tahun 2023, kategori tinggi tetap didominasi oleh Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual dengan rata-rata sebesar 67,47 tahun, sedangkan kategori rendah mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 62,80 tahun. Sementara itu, pada tahun 2024, kategori tinggi terdiri dari Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kota Ambon, dan Kota Tual dengan rata-rata sebesar 71,60 tahun, sedangkan kategori rendah mencakup sebagian besar wilayah lainnya dengan rata-rata 69,93 tahun. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat, namun berpotensi menambah beban ekonomi akibat meningkatnya penduduk usia lanjut. Oleh karena itu, peningkatan UHH perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup, akses layanan sosial, dan penguatan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) di Provinsi Maluku terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat (BPS Maluku, 2025)

Peningkatan umur harapan hidup tidak selalu berdampak linear terhadap kemiskinan karena dipengaruhi berbagai faktor struktural. Hal ini tercermin dari hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian Agung & Budiarti (2022) menunjukkan umur harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara penelitian,

Baiquni & Feriyanto (2025) menyimpulkan bahwa umur harapan hidup berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Fenomena diatas, Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan seperti di Provinsi Maluku (Haidar Akhmad Al Barabasi & Hastarini Dwi Atmanti, 2025b). Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku tidak hanya ditandai oleh tingginya persentase penduduk miskin, tetapi juga keterkaitannya dengan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Di tengah peningkatan PDRB, ketimpangan pendapatan antarwilayah menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum merata. Selain itu, efektivitas bantuan sosial masih perlu dievaluasi, sementara ketidakstabilan partisipasi angkatan kerja mencerminkan keterbatasan penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah kepulauan dan terpencil. Peningkatan umur harapan hidup juga berpotensi menambah beban ekonomi jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja dan perlindungan sosial yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Maluku merupakan hasil interaksi berbagai faktor, sehingga penting untuk diteliti secara empiris, terutama dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, bagi masyarakat miskin sebagai kelompok paling terdampak, serta bagi akademisi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan wilayah kepulauan. Meskipun berbagai penelitian telah

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, hasil empirisnya masih belum konsisten, khususnya terkait ketimpangan pendapatan, belanja bantuan sosial, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan umur harapan hidup. Berbagai studi menunjukkan pengaruh yang beragam, baik positif maupun negatif, sehingga belum menghasilkan kesimpulan yang konklusif. Kemudian Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan belum ada yang meneliti secara bersama-sama antara variabel ketimpangan pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup, terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Maluku tahun 2019-2024. Selain itu, kajian kemiskinan masih didominasi oleh penelitian pada wilayah dengan akses ekonomi dan infrastruktur yang relatif lebih baik, sementara penelitian pada wilayah kepulauan dengan keterbatasan konektivitas, ketimpangan pembangunan, dan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang menuntut pengujian empiris yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap faktor-faktor penentu kemiskinan di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup, terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi Maluku tahun 2019-2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019–2024?
2. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019–2024.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian empiris terkait faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan pembelajaran, serta sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dan sumber resmi lainnya yang relevan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 dimulai sejak bulan September 2025 dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi ekonomi pembangunan.

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

[illegible]